

### **BAB III**

#### **ETNIS TIONGHOA DALAM BIDANG EKONOMI DI INDONESIA**

Pada bagian ini akan membahas mengenai perjalanan ekonomi etnis Tionghoa di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang Tionghoa memiliki bakat berdagang sejak ia dilahirkan. Orang tua mereka mengajari anak-anaknya bagaimana memulai bisnis, sehingga tidak jarang bahwa bisnis yang dimilikinya pun turun temurun dari generasi ke generasi.

##### **A. Bakat dan etnisitas dalam perdagangan**

Perdagangan adalah dunia yang terbuka, siapapun dapat memasukinya. Hanya saja, tingkat kompetensi yang tinggi antara pelaku-pelaku perdagangan memerlukan nyali dan perhitungan ekonomi yang tepat dalam menghadapi dinamika yang senantiasa bergerak dan tidak semua orang mampu melakukan itu. Dalam beberapa kasus kemampuan berdagang dipengaruhi oleh bakat yang dimiliki dan etnisitas seseorang. Terdapat beberapa etnis yang seolah mereka ditakdirkan lahir di muka bumi untuk menjadi pedagang, seperti yahudi, india, spanyol dan Tionghoa. George Soros dapat dijadikan contoh bagaimana etnisitas dapat memengaruhi bakat seseorang menguasai bisnis internasional. Soros adalah orang Yahudi yang menjadi icon bagi pelaku spekulasi pasar modal dunia. Trik dan intrik usaha yang dilakukan berpengaruh besar terhadap gejolak ekonomi dunia. Ketika Nazi Hitler memutuskan langkah pembersihan atas orang-orang Yahudi (*ethnic genocide*) di Jerman, motivasi dibalik kebijakan tersebut sesungguhnya adalah adanya kesenjangan ekonomi yang lebar antara orang-orang Yahudi dan Jerman. Pasar-pasar di Jerman sebagian besar dikuasai oleh Yahudi, sehingga mereka dapat memonopoli alur distribusi barang dan fluktuasi harga.

Di Indonesia, Minangkabau, Madura, dan Tasikmalaya merupakan etnis yang memiliki kemampuan entrepreneurship yang tinggi. Perdagangan orang-orang Minangkabau dilihat dari jenis komoditas yang mereka perdagangkan, memperlihatkan bahwa pertekstil merupakan jenis yang sejak lama mereka telah kuasai. Di Tanah Abang, mayoritas pedagang pakaian dan bahan berasal dari Sumatra Barat. Orang Tasikmalaya, dikenal luas sebagai pedagang keliling yang menjual alat-alat rumah tangga dengan cara dicicil (dalam ungkapan yang

lazim yaitu, dikreditkan). Pangsa pasar yang mereka didik adalah ibu-ibu rumah tangga yang memang memiliki fungsi dan tugas lebih besar mengurus rumah tangga (domestic). Adapun orang Madura, identik dengan perdagangan besi tua dan lapak barang bekas.

Orang-orang Tionghoa adalah etnis yang menguasai sebagian besar perdagangan di Indonesia, mulai dari hulu sampai hilir sebagian besar jalur distribusi barang dikuasai oleh etnis ini. Penguasaan etnis Tionghoa atas jalur distribusi terbentuk melalui proses sejarah yang panjang. Penelusuran atas hal tersebut dapat dilakukan sejak masa colonial Belanda. Orang-orang Tionghoa dalam struktur perdagangan colonial telah dipakai sebagai pihak perantara antara orang-orang Belanda dengan orang-orang pribumi, selain itu mereka diberikan fasilitas monopoli perdagangan dan sebagai pelaksana rumah pegadaian, serta pemungut pajak.

Pada masa pemerintahan orde baru, pedagang beretnis Tionghoa juga mendapatkan fasilitas yang berlebih atas perdagangan, sehingga dapat mendominasi retail, usaha kecil, perdagangan komoditas, perdagangan besar, transportasi, industry, perbankan, dan keuangan pada lapisan tertinggi dalam sistem perekonomian di Indonesia.

## **B. Perdagangan Etnis Tionghoa di Indonesia**

Bangsa Tionghoa termasuk bangsa yang mobilitasnya tinggi. Hal ini dapat diketahui dari tingginya perpindahan (migrasi) penduduk di negara Tionghoa (Markhamah, 2000:1). Orang Tionghoa datang datang ke Indonesia, khususnya, dan Asia Tenggara pada umumnya, datang merantau dengan tujuan untuk mencari peruntungan nasib yang baik. Mereka datang semata-mata hanya untuk mempertahankan hidupnya, entah dengan berdagang, menjadi kuli atau petani (Widyahartono, 1988:221). Hal ini dilakukan orang Tionghoa karena didorong oleh faktor ekonomi, terutama karena kehidupan yang serba sulit akibat dari padatnya penduduk, sehingga lapangan pekerjaan di daerah asal mereka semakin sedikit.

Sejak dahulu sebelum pindah ke daerah-daerah Asia Tenggara, telah terkenal daerah “Nanyang” sebagai suatu daerah yang menurut mereka sangat ideal untuk kehidupan yang menyenangkan. “Nanyang “ artinya lautan selatan, jadi tepat sekali daerah Nanyang itu daerah yang sekarang kawasan Asia

Tenggara. Daerah impian Nanyang itu kemudian menjadi daerah operasi perekonomian yang memberikan kemungkinan mereka hidup senang. Kehidupan di negeri leluhurnya sangat payah, sedangkan di daerah Nanyang ini dapat hidup dengan tanpa banyak kesulitan, oleh karena itu mereka dengan cepat menjadi penguasa-penguasa dalam bidang perekonomian. Daerah Nanyang ini lebih banyak memberikan kemungkinan baru, oleh karena mempunyai aneka ragam flora dan fauna, sedangkan distribusi penduduk sedikit, jarang dan tidak merata, iklimnya enak, tidak sekeras seperti di daerah daratan Tionghoa di negeri leluhurnya (Hidajat, 2001:137-138).

Di pantai utara Jawa, pedagang-pedagang Tionghoa memegang peranan yang penting sebagai pemula dan pendorong usaha di berbagai bidang kegiatan ekonomi. Umumnya, mereka berdagang kain atau barang-barang kelontong. Namun, ada pula yang menjadi pengrajin atau pedagang besar antar pulau antar negeri (Zein, 2000:121)

Pada waktu kaum emigran Tionghoa datang ke Indonesia, kehidupan penduduk pribumi tergantung dari hasil pertanian dalam struktur masyarakat feodalis. Penduduk pribumi tidak menyukai usaha perdagangan. Oleh karena itu orang Tionghoa menempati kesempatan ini, sehingga dengan modal tekun, teliti dan cermat, akhirnya orang Tionghoa dapat menguasai sektor perdagangan di semua lapisan masyarakat. Sejak itu pola kehidupan orang Tionghoa di Indonesia cenderung sepenuhnya kepada usaha ekonomi, khusus dalam perdagangan dan usaha industri. Sesuai dengan tujuan semula mereka datang ke daerah Nanyang khususnya ke daerah Indonesia, oleh karena mereka tertarik akan kehidupan yang menyenangkan itu. Di samping itu pemerintah jajahan dengan sengaja mendatangkan mereka itu dengan tujuan dipergunakan untuk kaum buruh pada perkebunan dan pertambangan (Hidajat, 2001:138).

Orang Tionghoa ini didatangkan dengan ikatan kontrak oleh pemerintah kolonial Belanda. Akan tetapi setelah habis kontraknya, mereka mulai hidup sendiri-sendiri dalam usaha pertambangan dan perdagangan juga dalam usaha perantara dan sebagai usaha penyalur. Majunya dalam usaha perdagangan dan usaha industri serta dalam usaha pertambangan, makin menyedot masuknya orang Tionghoa ke Indonesia, sehingga jumlah orang Tionghoa itu makin banyak yang menetap sebagai perantau di Indonesia. Sejak itu timbulah kota-kota perdagangan dan kota pertambangan serta kota-kota industri di seluruh Indonesia terutama di kota-kota pantai. Sejak itulah orang Tionghoa memegang

peranan penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Tujuan hidupnya untuk berusaha dengan sukses dalam bidang perdagangan, industri, perbankan, dan dalam bidang pertambangan (Hidajat, 2001:138).

Pada dasawarsa 1930-an orang-orang etnis Tionghoa sudah mendominasi perdagangan perantara, dan mereka mendirikan dua pabrik pengolahan karet terbesar di Palembang. Yang satu adalah Hok Tong, milik seorang etnis Tionghoa yang tinggal di Singapura, dan yang satunya lagi adalah Kiang Gwan, sebuah perusahaan dagang dari kelompok Oei Tong Ham, yang merupakan kelompok usaha etnis Tionghoa terbesar di Asia Tenggara pada zaman sebelum Perang Dunia II. Kiang Gwan mempunyai cabang di Bombay, Kalkuta, Karachi, Shanghai, Hong Kong, Amoy, Singapura, dan London (Yoshihara, 1988:229, dalam Irwan, 2009:182). Para pedagang karet pribumi kalah dalam menghadapi pengusaha etnis Tionghoa yang jaringan dagangnya merentang dari desa-desa sampai ke kota pelabuhan Palembang dan Singapura.

Dalam (Hidajat, 2001:83) dijelaskan bahwa jenis usaha yang etnis Tionghoa adalah sebagai penguasaha Bank, perdagangan, industri dan pertanian. Menurut catatan pada tahun 1930 dari jumlah 1.233.000 orang, sejumlah 470.000 orang sebagai pengusaha dalam berbagai bidang, antara lain:

- a. Produksi bahan mentah sebanyak 145.000 orang.
- b. Bidang industri ada 94.000 orang
- c. Perdagangan ada 185 orang
- d. Sebagai pegawai pemerintah ada 3.000 orang
- e. Dalam bidang usaha-usaha lain ada 43.000 orang

Etnis Tionghoa yang telah berpendidikan mulai menekuni bidang-bidang yang terspesialisasi. Misalnya dokter, akuntan dan pengajar. Yang bekerja sebagai kuli atau buruh kasar baik yang terampil ataupun tidak, mulai menyusut jumlahnya. Selain itu, banyak yang bekerja di perusahaan-perusahaan Tionghoa (Mackie, dalam Fadillah, 2011: 45). Jadi, pada periode tahun 1930-an, sebagian besar etnis Tionghoa bekas kuli berganti peran menjadi pedagang dan usahawan dalam perdagangan kecil-kecilan atau industri berskala kecil yang menyisihkan para pedagang dan usahawan kecil pribumi, tetapi tidak usahawan-usahawan Belanda.

Pada masa kemerdekaan kedaan menjadi semakin aman, usaha orang Tionghoa ini semakin lancar dan makin luas usahanya, sedangkan masyarakat pribumi Indonesia baru akan membangun usaha ekonominya dan menyadari

akan ketinggalan dalam bidang industri, dalam bidang perdagangan dan dalam bidang perbankan serta di samping itu hubungan-hubungan dengan pedagang-pedangan luar negeri sedikit sekali pengalamannya. Dengan demikian sejarah perkembangan masyarakat dan negara Indonesia telah memberikan kesempatan dan keuntungan nasib baik bagi orang-orang Tionghoa Indonesia, sehingga orang-orang Tionghoa dalam bidang ekonomi adalah segala-galanya. Itulah suatu kondisi yang menghasilkan mental sosio-ekonomis orang Tionghoa, yang berpegang pada keyakinan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dalam situasi apapun, serta dengan jalan apapun, bahkan kalau perlu dengan jalan ilegal dan main manipulasi serta kegiatan-kegiatan subversi (Hidajat 2001:139-140).

Secara umum perusahaan Belanda dan pihak swasta asing dominan dalam sektor ekonomi utama, seperti manufacture, perkebunan, industri tekstil dan lain-lain. Muncul perubahan peran ekonomi etnis Tionghoa, yang saat itu sedikit demi sedikit memasuki usaha grosir dan ekspor-impor yang waktu itu masih didominasi Belanda. Kemudian diikuti oleh tumbuhnya bank-bank swasta kecil yang dimiliki oleh etnis Tionghoa, dan muncul juga dalam industri pertekstilan (Mackie dalam Fadillah, 2011:322-323).

Kegiatan ekonomi etnis Tionghoa semakin menonjol pada periode tahun 1957 sampai 1958. Keberhasilan usaha mereka mengambil alih perusahaan-perusahaan besar Belanda yang dinasionalisasi, walaupun kondisi politik dan ekonomi Indonesia tidak menguntungkan mereka, apalagi setelah peristiwa G 30 S/PKI tahun 1965. Kunci utama keberhasilan pelaku ekonomi baru etnis Tionghoa, adalah merintis kedekatan dengan pejabat pemerintah pada awal Orde Baru sebagai pembinaan hubungan secara ekonomi dan politis. Walaupun demikian, orang Tionghoa tidak banyak yang terjun secara terbuka dalam politik praktis saat itu, mereka melakukannya lewat dukungan material dan non material (<http://web.budaya-tionghoa.net>).

(Husodo, 2015:70) menjelaskan bahwa orang-orang non pribumi keturunan Tionghoa dengan cepat menguasai kegiatan ekonomi yang semula dikuasai oleh perusahaan-perusahaan Belanda, ini karena mereka mempunyai hubungan langsung dengan orang-orang Tionghoa di Honkong, Singapura, dan mereka tidak mempunyai saingan yang berarti dari Perusahaan Negara. Tetapi munculnya perusahaan-perusahaan yang dikuasai etnis Tionghoa berdampak negatif, dengan tidak dilibatkannya pengusaha pribumi untuk bekerjasama dalam

korporatisasi perusahaan-perusahaan. Efek negatif yang muncul adalah semakin tajamnya persaingan usaha pribumi dan non pribumi.

Perilaku hubungan jaringan kerja antara etnis Tionghoa terbentuk karena pengalaman yang mereka lalui. Sesama migran etnis Tionghoa di manapun berada saling menjaga dan membantu pendatang-pendatang baru di bumi nusantara yang mereka tempati sebagai negara harapan.

(Menurut Wertheim dalam Sari, 2019:293), pembagian kelas etnis Tionghoa dengan masyarakat pribumi bersifat vertikal dalam artian sebagai sikap primordial, akibat tanggapan bahwa etnis Tionghoa dianggap kelompok minoritas. Kompetisi antar pelaku ekonomi Tionghoa (terutama sebagai pengusaha atau wiraswastawan) dengan masyarakat pribumi sering menjadi penyebab konflik tertutup maupun terbuka terhadap etnis Tionghoa.

Hubungan jaringan kerja antar etnis Tionghoa di Indonesia ini, menguatkan psikis anggotanya melalui hubungan bisnis dan sebagainya. Selain itu hubungan jaringan kerja ini berfungsi sebagai mediator toleransi antar etnis Tionghoa dengan masyarakat, terutama dalam hubungan bisnis.

Kuatnya hubungan jaringan kerja etnis Tionghoa di Indonesia ini semakin meningkatkan kekuatan usaha etnis Tionghoa. Situasi dan kondisi ini mendorong usahawan etnis Tionghoa mendirikan usahanya sampai ke wilayah-wilayah pelosok pedesaan. Tetapi kondisi ini tidak memancing konflik usaha dengan pengusaha pribumi, justru dominasi pengusaha etnis Tionghoa pada sektor-sektor kehidupan ekonomi yang lebih penting di kota besar yang menjadi salah satu penyebab saingan keras dengan pengusaha pribumi kelas menengah.

Sementara itu masyarakat kelas menengah pribumi belum begitu kuat dalam sektor ekonomi modern, kecuali konglomeratnya. Kondisi ini diperburuk dengan sikap beberapa birokrat atau pejabat tinggi Indonesia yang cenderung lebih menyukai kerjasama dengan etnis Tionghoa untuk menjalankan usaha mereka, karena etnis Tionghoa dianggap lebih berpengalaman dan kuat modal daripada pribumi. Selain itu, bekerjasama dengan pengusaha pribumi rentan resiko karena mereka umumnya beraliansi pada partai-partai politik tertentu, sementara pengusaha etnis Tionghoa umumnya netral dalam politik. Kondisi ini yang semakin menyuburkan praktik percukongan, korupsi, kolusi dan nepotisme.

Walaupun demikian, kegiatan ekonomi etnis Tionghoa di Indonesia masih cenderung mengarah pada sistem patron-klien dengan beberapa pejabat pemerintah Indonesia, demi menjaga keamanan dan kesejahteraan mereka.

Tetapi tak dipungkiri kehadiran mereka membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada umumnya.

Menurut (Mackie 1991:330-332) , kegiatan ekonomi etnis Tionghoa, terutama yang berjenis perusahaan konglomerat, diidentifikasi dalam 7 (tujuh) karakteristik, yaitu:

1. Mayoritas berupa keanekaragaman kepentingan, yang tidak lepas dari “core business”-nya, misalnya pangan.
2. Orang-orang baru sebagai pelopor pembentukan struktur konglomerasi, karena tidak semua perusahaan keluarga berlatar belakang dari perusahaan keluarga etnis Tionghoa yang telah mapan sebelumnya. Contohnya, Liem Sioe Liong adalah usahawan etnis Tionghoa perantauan yang semula miskin.
3. Mempunyai hubungan dengan modal asing. Perusahaan-perusahaan etnis Tionghoa yang mapan cenderung dipercaya oleh pihak asing daripada perusahaan pribumi atau perusahaan negara.
4. Mempunyai kepemilikan bank-bank swasta, di mana kepemilikannya dimanfaatkan untuk membantu kepentingan yang lebih luas bagi para konglomerat.
5. Investasi dilakukan bukan pada sektor pertambangan, perkebunan dan industri berat, karena sektor-sektor tersebut memiliki resiko politis dan resiko kerugian paling besar.
6. Investasi di luar negeri, terutama Singapura dan Hongkong, memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi dan tidak terlalu besar resiko politis dan ekonominya.
7. Sebagian besar perusahaan keluarga berfungsi sebagai inti perusahaan konglomerat, walaupun kini tingkatan managernya bertumpu pada profesionalitas manager dan pekerja, tetapi tidak meminimalisir “peran” pemilik perusahaan keluarga tersebut. Ciri kegiatan bisnis etnis Tionghoa ini terlihat dalam komposisi staf dalam perusahaannya, di mana jabatan mengambil keputusan berada di tangan kolega etnis Tionghoa atau anggota keluarga yang dipercaya.

### **A. Kondisi Ekonomi Etnis Tionghoa dan Indonesia Pada Rezim Orde Baru dan Awal Reformasi (1986-2000)**

Pada zaman Orde Baru sistem ekonomi yang berkembang yaitu Sistem Cukong. Cukong adalah istilah Hokkian yang artinya majikan atau bos, tetapi dalam konteks Indonesia, istilah ini digunakan untuk menyebut seorang pedagang Tionghoa yang bekerja sama dengan elite yang berkuasa, termasuk presiden dalam perusahaan patungan. Umumnya mitra pribumi memberikan fasilitas dan perlindungan, sedangkan orang Tionghoa memberikan modal dan menjalankan perusahaan tersebut. Sistem cukong ini dianggap tidak menguntungkan pribumi, sehingga menimbulkan kritik pedas dari pihak pribumi terhadap pemerintahan Orde Baru. Mereka sangat kritis terhadap sistem ini karena tidak ada pemindahan ketrampilan. (Suryadinata, 2012:101)

Disamping itu juga karena hanya pihak yang berkuasa yang dapat menikmati hasilnya. Berhubung dengan protes yang dilakukan oleh pihak pribumi dan kerusuhan anti-Tionghoa yang makin sering terjadi pada tahun 70-an, pemerintah Orde Baru mulai mulai melaksanakan politik pribumi kembali dalam bidang ekonomi. Untuk memperoleh bagian yang lebih besar bagi pribumi dalam bidang ekonomi, Pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan pada 1974 dimana ditentukan bahwa penanaman modal asing harus berupa perusahaan patungan. Banyak bidang bisnis yang tertutup bagi orang Tionghoa Indonesia. (Subandi, 2016:5).

Dengan kata lain, surat izin baru tidak akan dikeluarkan lagi untuk pedagang nonpribumi. Peraturan yang mencerminkan kebijakan ini adalah Keppres No. 14 yang dikeluarkan pada tahun 1979. Keppres ini kemudian disempurnakan dan menjadi Keppres No. 14A /1980 yang mewajibkan semua lembaga pemerintah dan kementerian memberikan keistimewaan kepada pedagang dan kontraktor pribumi. Untuk proyek besar, usaha patungan antara pribumi dan non pribumi digalakkan, akan tetapi pribumi harus memiliki andil 50 persen dan harus aktif dalam perusahaan tersebut. Dalam dekade terakhir Orde Baru konglomerat yang bersangkutan dengan Cendana tumbuh makin subur dan besar di Indonesia, sehingga menjadi sorotan Internasional. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kelompok Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) inilah yang sebetulnya menguasai ekonomi Indonesia, bukan orang-orang Tionghoa kelas menengah.

Meskipun demikian tidak bisa disangkal bahwa kedudukan ekonomi nonpribumi menguat dalam zaman Orde Baru, terutama dalam bidang perdagangan, yang konon 70 persen dikuasai oleh pedagang Tionghoa. Ini merupakan akibat dari kebijakan pemerintah Orde Baru yang menjuruskan orang Tionghoa ke bidang ekonomi. Kebijakan ini merupakan keputusan yang dibuat pada Seminar Angkatan Darat yang diselenggarakan di Bandung pada tahun 1966, dimana ditetapkan bahwa orang Tionghoa harus dicegah masuk bidang lain, terutama kebidang politik, karena pemimpin militer tidak percaya kepada orang Tionghoa sebagai sebuah kelompok. (Suryadinata, 2012:102)

Dengan membatasi orang Tionghoa di bidang ekonomi, elite yang berkuasa merasa bahwa pemerintah bisa lebih mudah menguasai minoritas Tionghoa. Mungkin juga ini berhubungan dengan keputusan pemerintah Orde Baru untuk menekankan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Jadi orang Tionghoa disalurkan ke bidang tersebut supaya ekonomi Indonesia bisa berkembang pesat. Ada yang berpendapat bahwa pemerintah sengaja memupuk orang Tionghoa dalam bidang ekonomi supaya mereka mudah diajak kerjasama, bahkan diperas. Sedangkan kaum pribumi sukar untuk diperlakukan demikian karena mereka mempunyai kedudukan politik yang kuat.

Mungkin hal tersebut ada benarnya karena akibat kebijakan Orde Baru tersebut, segelintir pengusaha yang terkait dengan pengusaha besar bermunculan yang dikenal sebagai konglomerat. Kesenjangan masyarakat makin kentara dan jurang antara orang Tionghoa dan pribumi, jika ukan diseluruh Indonesia, sekurang-kurangnya di Jawa dan Sumatera, semakin besar. Pada saat itu pemerintah Soeharto juga menghimbau konglomerat membantu perusahaan lemah dan menjual 1 sampai 25 persen dari sahamnya kepada koperasi. Namun program semacam ini tidak berhasil mengatasi masalah ekonomi yang parah dan jurang ekonomi-sosial yang melebar. (Kakarisah, 2010:84)

Kekuatan ekonomi Tionghoa pada zaman Orde Baru bertambah, ini disebabkan oleh kebijakan Soeharto yang mementingkan pertumbuhan ekonomi dan mengarahkan orang Tionghoa ke bidang ekonomi. Pemerintah Soeharto menutup bidang-bidang lain untuk orang Tionghoa. Selama 32 tahun Soeharto berkuasa, muncul beberapa ratus konglomerat diantaranya yang terbanyak etnis Tionghoa dan yang paling banyak membayar pajak penghasilan di antara

konglomerat itu juga orang Tionghoa. Ini merupakan bukti bahwa Tionghoa mendominasi ekonomi di Indonesia, seakan-akan semua konglomerat itu adalah orang Tionghoa dan kekayaan mereka yang berlimpah-limpah itu adalah hasil KKN. . Pemusatan perhatian terhadap orang Tionghoa itu juga mengabaikan satu fakta bahwa perusahaan-perusahaan asing umumnya jauh lebih besar dari konglomerat lokal.

Memang konglomerat itu kaya raya dan jumlahnya dari duaratus hingga tigaratus orang. Persepsi masyarakat pribumi sering menganggap semua orang Tionghoa kaya dan segelintir konglomerat adalah wakil masyarakat yang tionghoa. Selain daripada itu, tokoh-tokoh pribumi juga berpendapat bahwa orang Tionghoa bukan saja kaya tetapi juga menguasai ekonomi Indonesia.

Kedudukan ekonomi orang Tionghoa Pada masa ini adalah warisan sejarah kolonial karena politik Belanda orang Tionghoa menjadi orang Tengah antara Belanda dan pribumi. Di Pulau Jawa mereka dibatasi pada perdagangan dan orang Tionghoa berangsur-angsur mendominasi sektor perdagangan. Dengan masuknya imigran Tionghoa secara besar-besaran pada awal abad ke-20 selama tiga dasawarsa menjadikan pedagang peranakan Tionghoa mulai bergeser oleh Totok Tionghoa. Banyak peranakan yang terpaksa mengambil pekerjaan sebagai pegawai atau masuk ke bidang profesional. Meskipun demikian perdagangan distribusi masih dikuasai orang Tionghoa. Orang Tionghoa tidak menghadapi kesulitan-kesulitan yang berarti, karena kelas menengah pribumi masih kecil. Dalam zaman Orde Baru, Indonesia menjalankan sistem ekonomi pasar sehingga banyak kesempatan etnis Tionghoa untuk berdagang. (Suryadinata, 2012).

Krisis moneter pada tahun 1997 mempunyai dampak yang luar biasa pada politik dan ekonomi Indonesia. Keadaan ekonomi Indonesia semakin buruk Sejak saat itu. Keadaan makin parah edit yang mendukung Soeharto terjadi perpecahan. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 memberikan pengaruh besar terhadap pengamat yang mewah di Indonesia. Sejak tahun 1990 istilah konglomerat lebih banyak dipakai daripada istilah Jepang karena istilah konglomerat lebih netral dan termasuk orang pribumi. Yang mendadak merosot dan banyak konglomerat yang punya hutang dalam mata uang Jepang dan dolar menjadi kewalahan. Apalagi Bang Bang konglomerat yang memang tidak bonafit. Sebelum Soeharto Lengser 16 Bank sudah insolven dan harus ditutup. Setelah Soeharto Lengser lebih banyak bank dan perusahaan yang bangkrut. Bank-bank

besar ini termasuk BCA bank Danamon Bank Dagang nasional Indonesia dan modern PDF Ci dan bank Tiara.

Pertengahan 1998, inflasi ditargetkan mencapai angka 80% untuk tahun berjalan, namun akhirnya target tersebut tidak tercapai. Peristiwa Badai El nino menjadikan panen beras berkurang. Nilai tukar rupiah berada di bawah Rp 10.000,00 per dollar, bahkan mencapai level Rp 15.000,00 - Rp 17.000,00 dan diperkirakan 113 juta orang Indonesia (56% dari jumlah penduduk) berada di bawah garis kemiskinan. Pada akhir Juni 1998, anggaran negara harus direvisi untuk ketiga kalinya karena asumsi-asumsinya tidak relevan. IMF memprediksi bahwa perekonomian akan menurun sebanyak 10%. B.J. Habibie mundur dari kekuasaan pada 20 Oktober 1999, digantikan oleh Abdurrahman Wahid.

Masa Kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dimulai pada 20 Oktober 1999. Gus Dur memiliki intelegensia, kekocakan, keterbukaan dan komitmen terhadap pluralisme serta kebencian terhadap dogmatisme (Rickles, 2008, 655).

Pada tahun 2000 beberapa indikator menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi nampak menguat. Pertumbuhan ekonomi meningkat lebih tinggi dari yang diprakirakan, yakni menjadi 4,8%. Beberapa faktor seperti membaiknya permintaan domestik, masih kompetitifnya nilai tukar rupiah, serta situasi ekonomi dunia yang membaik, telah memungkinkan sejumlah sektor ekonomi, termasuk sektor usaha kecil dan menengah (UKM), meningkatkan kegiatan usaha mereka, baik untuk memenuhi konsumsi domestik maupun ekspor.

Beberapa kemajuan juga dicapai, misalnya dalam proses restrukturisasi perbankan, penjadwalan kembali utang luar negeri pemerintah, serta penyelesaian masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) antara Bank Indonesia dan Pemerintah. Pertumbuhan ekonomi didukung oleh nilai tukar yang kompetitif dan ekspor non migas menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan kegiatan investasi semakin meningkat. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, tingkat pengeluaran konsumsi juga ikut mengalami peningkatan. Ekspor, investasi, dan konsumsi terhadap pertumbuhan PDB pada tahun 2000 masing-masing mencapai 3,9%, 3,6%, dan 3,1%. Kuatnya kinerja ekspor dan peran investasi yang meningkat dalam pembentukan PDB mengindikasikan semakin mantapnya proses pemulihan ekonomi yang terjadi.

## **B. Segi Pedagogis**

Bakat dan etnisitas Tionghoa dalam perekonomian sudah tidak diragukan lagi. Kegigihan dan kerjakerasnya membuat kesuksesan tersendiri bagi Etnis Tionghoa. Hal ini mengandung nilai yang patut kita teladani dari etnis Tionghoa.

Nilai karakter yang terkandung dalam bab ini adalah sebagai berikut:

- a. Nilai keuletan, orang Tionghoa datang ke Indonesia memiliki misi untuk berdagang. Misi ini terus dijalani oleh orang Tionghoa sampai sekarang. Banyak dari kalangan etnis Tionghoa yang mayoritas mata pencahariannya sebagai pedagang ataupun sebagai pengusaha. Hal ini menandakan konsistensi misi dalam hidup bagi etnis Tionghoa.
- b. Kerja keras yakni kebiasaan orang Tionghoa untuk tidak menyerah. Meskipun banyak rintangan yang dihadapi untuk melakukan perdagangan di Indonesia, orang-orang Tionghoa tidak menyerah begitu saja. Mereka terus berjuang untuk berdagang. Hal ini mengindikasikan bahwa kerja keras harus ditanamkan bagi setiap orang. Melalui kerja keras maka semua tujuan dan keinginan yang kita harapkan dapat terwujud.
- c. Nilai Religius, di mana penduduk Tionghoa sebagian besar beragama Konghucu. Pada masa kolonial dan kependudukan Jepang maupun Belanda etnis Tionghoa tidak meninggalkan kewajibannya sebagai umat Konghucu. Hal ini terlihat adanya klenteng yang didirikan oleh etnis Tionghoa diberbagai daerah, misalnya di Kalimantan.
- d. Teladan yakni kebiasaan orang Tionghoa untuk menjadi teladan bagi keturunannya. Bekerja keras untuk kehidupan mendatang perlu untuk dilakukan, dengan bekerja keras segalanya dapat tercapai dengan maksimal.